

# Reaksi Iran dan Arab Saudi atas Beragam Kritikan: Studi Komparasi Kebijakan Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman

Fachri Syauqii<sup>1\*</sup>, Andre Syahbana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Medan, Indonesia

<b>ABSTRACT</b> <p>This study aims to determine the extent to which the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia take democratic values. The results show that Iran is more democratic than Saudi Arabia, which in fact adheres to an absolute monarchy system of government. Although there are some cases that undermine democracy in Iran, such as the death of Mahsa Amini. Ayatollah Khamenei responded calmly and will solve the problem thoroughly. Meanwhile, Saudi Arabia itself opposes anyone who protests against government policies, including the new policy designed by Muhammad bin Salman (MbS), namely Saudi Vision 2030. One of the cases that criticized the Saudi regime was the death of a journalist named Jamal Kashoggi, which was not resolved completely. This research uses descriptive qualitative with a historical and comparative approach. The data or sources used are related journal articles, books, and some survey results on various internet sites, such as pewresearch.org and statista.com, that describe the democracy index in Iran and Saudi Arabia. It also uses data from the media highlighting the two countries, both Iran and Saudi Arabia, which is analyzed by interpreting it to avoid bias.</p>	<b>CONTACT</b> <a href="mailto:fachrisyauqii770@gmail.com">fachrisyauqii770@gmail.com</a>
<b>ABSTRAK</b> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Republik Islam Iran dan Arab Saudi menganut nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iran lebih demokratis dibandingkan Arab Saudi yang notabene menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Meskipun ada beberapa kasus yang menggerogoti demokrasi di Iran, seperti kasus tewasnya Mahsa Amini. Ayatollah Khamenei menanggapinya dengan tenang dan akan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Sementara itu, Arab Saudi sendiri menentang siapa pun yang memprotes kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan baru yang dirancang oleh Muhammad bin Salman (MbS), yaitu Saudi Vision 2030. Salah satu kasus yang mengkritisi rezim Saudi adalah tewasnya seorang jurnalis bernama Jamal Kashoggi yang tidak terselesaikan secara tuntas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Data atau sumber yang digunakan adalah artikel jurnal terkait, buku, dan beberapa hasil survei di berbagai situs internet, seperti pewresearch.org dan statista.com, yang menggambarkan indeks demokrasi di Iran dan Arab Saudi. Selain itu juga menggunakan data dari media yang menyoroti kedua negara, baik Iran maupun Arab Saudi, yang dianalisis dengan cara menafsirkannya untuk menghindari bias.</p>	<b>KEYWORDS</b> Kebijakan Ali Khamenei, Politik Islam, Politik Kontemporer, Muhammad bin Salman, Studi Komparasi, Arab Saudi, Iran
	Received: 10/05/2024 Revised: 7/06/2024 Accepted: 10/08/2024 Online: 31/10/2024 Published: 31/10/2024
	Al-ijtima'i is licenced under a <a href="#">Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</a>

## INTRODUCTION

Iran dan Arab Saudi merupakan dua negara Islam yang menerapkan konsep pemerintahan berbasis Islam dengan dua tradisi yang berbeda, yaitu Sunni-Syiah, telah mengalami kegagalan dalam menjalankan demokrasi, meski demokrasi bukan satu-satunya sistem terbaik untuk diterapkan di tiap negara. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa insiden yang terjadi di dua negara tersebut, seperti kasus hilangnya seorang jurnalis bernama Jamal Kashoggi pada tanggal 2 Oktober 2018, di Kantor kedutaan besar Arab Saudi di Istanbul, Turki (Ashadi 2019). Pemerintah Arab Saudi melakukan penangkapan secara sistematis atas dirinya bersama dengan para intelektual, ulama, dan media influencer yang dianggap memiliki pendapat yang berbeda terhadap kebijakan kerajaan Arab Saudi.

Beberapa artikel Jamal Kashoggi di kolom Washington yang mengkritik Muhammad bin Salman (MBS): (1) Artikel yang berjudul "Saudi Arabia wasn't always this repressive. Now it's unbearable." Ditulis pada tanggal 18 September 2017. (2) Kedua pada tanggal 1 November 2017 berjudul "Saudi Arabia's crown prince wants to 'crush extremists.' But he's punishing the wrong people". (3) Tulisan ketiga pada tanggal 6 November 2017 berjudul "After more crackdowns, it's clear Saudi Arabia's Mohammed bin Salman is acting like Putin" (Firnanda 2020).

Insiden yang terjadi di Iran berbeda dengan Arab Saudi. Kebebasan berekspresi dan hak-hak bagi perempuan Iran masih terbatas. Keterbatasan dalam berekspresi terlihat di beberapa bidang, seperti pendidikan, busana, politik, dan seni. Salah satu kasus yang terjadi di Iran adalah ketika tahun 2017, saat Sahar Tabar memposting fotonya yang ia klaim mirip Angelina Jolie. Ia kemudian ditahan oleh pemerintah Iran. Kasus terbaru mengenai keterbatasan hak perempuan di Iran adalah kematian Mahsa Amini yang terjadi pada tanggal 13 September 2022. Dalam kasusnya ia dianggap tidak mengenakan jilbab secara pantas. Ia kemudian dinyatakan mati tepatnya pada tanggal 16 September 2022. Kematian Mahsa Amini berakibat buruk dari ketatnya peraturan terkait tata cara berpakaian untuk perempuan di Iran (Mas'odi and Ahmad 2023).

Tudingan miring tersebut langsung ditanggapi oleh Ali Khamenei sebagai seorang pemimpin tertinggi di Republik Islam Iran. Melansir dari NBC News, Ali Khamenei ikut turut berduka atas kematian Mahsa Amini dan menuding bahwa peristiwa tersebut sudah direncanakan oleh pihak Amerika (Smith 2022). Sementara melansir dari The Guardian, sebuah survei independen yang dilakukan tahun 2020 melaporkan bahwa sekitar 72% warga Iran menentang pasal yang mewajibkan berjilbab. Menurut presiden Iran, Ebrahim Raisi, mengeluhkan adanya standar ganda pada negara Barat di hadapan PBB di New York. Sementara untuk kasus pembunuhan Jamal Kashoggi, melansir dari The Guardian, secara jelas menceritakan kronologi pembunuhan jurnalis tersebut dan sebagian pihak, seperti mantan pejabat Saudi, menganggap bahwa Pangeran Muhammad bin Salman merupakan dalang dari pembunuhan itu, namun ia sembunyi tangan dari tragedi tersebut.

Kedua negara tersebut, baik Iran maupun Arab Saudi, walaupun mazhab Islam yang dipakai berbeda dalam pemerintahan, antara imamah dan wahabi, juga antara teokrasi dan monarki absolut, masih akan menghadapi tantangan sulit yang akan datang. Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, secara tegas perlunya Islam memisahkan antara urusan agama dan negara. Namun, hubungan antara keduanya tetap harus terjalin dengan negara yang harus bersikap netral terhadap agama, karena manusia cenderung mengikuti urusan pribadinya termasuk dalam urusan agama. Ia juga menambahkan bahwa negara tetap perlu mengakui fungsi publik Islam dikarenakan adanya pengaruh dalam pembuatan kebijakan publik maupun undang-undang. Syariah bisa berperan di ruang publik harus melalui tahap objektifikasi atau formulasi secara netral dan harus melibatkan proses legislasi institusi demokrasi modern (An-Na'im 2008). Khaled Abou El-Fadl memiliki pandangan yang berbeda dengan An-Na'im, menurutnya apabila pelaksanaan hukum Islam menjadi bagian dari negara harus jauh dari tindakan koersif, yang artinya tidak dilakukan dengan paksaan (Muzakkir 2023).

Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian serupa, di antaranya: (1) Idil Akbar berjudul "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)" (2017), dalam jurnalnya menjelaskan adanya perbedaan dan perbandingan konsep pemerintahan yang digunakan oleh Iran dan Arab Saudi, serta implementasi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dengan menggunakan syariat Islam. Namun, hasilnya adalah kedua negara tersebut bukan negara ideal yang merepresentasikan khilafah. (2) Khotibul Umam berjudul "Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah" (2022), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa adanya persaingan politik di kawasan Timur Tengah antara Arab Saudi, Iran, dan Israel. Iran dan Arab Saudi memiliki kebijakan, pandangan, dan kepentingan politik yang berbeda di Timur Tengah. (3) Fauzan & Fata berjudul "Model Penerapan Syariah dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, dan Indonesia)" (2018), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi dalam politik dunia Islam disebabkan pengaruh modernisasi. Iran dan Arab Saudi merupakan negara yang tidak terlepas dari pengaruh tersebut.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, disimpulkan bahwa diskursus mengenai perbandingan sistem pemerintahan Iran dan Arab Saudi cukup populer dalam kajian politik Islam, namun belum terdapat kritikan tentang kedua negara tersebut yang bersifat konstruktif. Oleh sebab itu, artikel ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Berangkat dari pemaparan di atas, artikel ini memfokuskan pada bagaimana kedua negara tersebut, baik Iran maupun

Arab Saudi, dalam mengambil nilai-nilai demokrasi pada sistem pemerintahannya yang mana Iran menganut sistem republik tapi keputusan ada di tangan Ayatullah Khamenei, sementara Arab Saudi lewat reformasi yang dilakukan oleh MbS menyadari pentingnya Saudi untuk mengikuti arus modernisasi.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya historis dan komparatif dengan membandingkan dua kebijakan pemimpin Islam, yaitu Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman (Aminah and Rokan 2019). Tentu antara keduanya sangat jauh berbeda dari berbagai segi, seperti sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, ideologi yang dianut, dan sebagainya. Namun, tujuan dari perbandingan tersebut adalah ingin melihat bentuk atau sistem pemerintahan yang ideal yang akan dipakai oleh umat Islam. Sumber atau data yang digunakan berupa artikel jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian, seperti artikel yang membahas fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ali Khamenei, kemudian juga ada isi mengenai visi Arab Saudi untuk tahun 2030 yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Salman (MBS). Kebijakan antara keduanya, baik Ali Khamenei dan MBS, bukan tanpa celah melihat adanya berbagai kritik yang bermunculan di berbagai media. Oleh karena itu, perlu menggunakan teknik analisis data dengan melakukan interpretasi untuk mendapatkan penafsiran dari data yang telah didapatkan. Sumber lainnya menggunakan hasil survei dari beberapa situs internet yang menggambarkan indeks demokrasi Iran dan Arab Saudi, seperti The Economist dan Pew Research Center.

## RESULTS

### Perbandingan Kebijakan Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman

Pada tanggal 5 Agustus 1905, kekuasaan Iran yang berada di bawah Raja Mohammad Ali membentuk sebuah Dewan perwakilan yang berkedudukan di Tehran, yang terdiri dari para pangeran, tokoh-tokoh agama, orang-orang penting, pedagang, pemilik modal dan pekerja tangan. Mereka membuat hukum yang bertujuan untuk membagikan kekuasaan raja yang selama ini bersifat mutlak pada 30 Desember 1906. Kemudian, mereka membuat Dewan Perwakilan dan Senat yang beranggotakan 60 orang. Sebuah hukum tambahan juga dibuat pada 7 Oktober 1907. Untuk pertama kalinya Iran membentuk tiga pembagian kekuasaan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Konstitusi baru tersebut disahkan oleh Raja Mohammad Ali yang menggantikan Muzhafarudin pada 19 Januari 1907. Namun pada 24 Desember 1911, Majelis tersebut dipaksa bubar oleh Rusia (Tamara 2017).

Revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 telah mengubah struktur politik Iran secara besar. Bentuk Republik Islam banyak disetujui oleh masyarakat Iran sebesar 98,2% dengan mengadakan referendum pada 1 April 1979 disusul Undang-undang Dasar Republik Islam yang telah disetujui oleh rakyat Iran sebesar 99,5% dalam pengadaaan referendum pada 3 Desember 1979. Namun, satu hal ditambahkan oleh Ayatullah Khomeini yang menjadi ciri khas pemerintahan Republik Islam Iran saat ini, yaitu vilayat al-faqih. Menurut Ja'far Al-Hadar, vilayat al-faqih merupakan hasil interpretasi dari Ayatullah Khomeini dalam menerapkan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, yang mana ditekankan pada kualitas khusus dari seorang pemimpin, bukan terletak pada konstitusinya. Sehingga saat ini yang memiliki otoritas tertinggi di Republik Islam Iran adalah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei (Al-Hadar 2014). Walaupun Republik Islam Iran telah melakukan banyak proses dalam pemilihan presiden, namun yang memutuskan dalam memberikan kewenangan, membuat kebijakan, serta pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan bagi negara adalah Wali Faqih yaitu Ayatullah Khomeini kemudian dilanjutkan oleh Ayatullah Ali Khamenei (Hidayat 2023).

Presiden pertama yang memimpin Republik Islam Iran adalah Abolhasan Bani Sadr yang terpilih pada Januari 1980 dari dukungan kalangan reformis modernis. Kemudian, ia dimakzulkan oleh parlemen Iran dan diberhentikan oleh Ayatullah Khomeini, karena diduga melakukan konspirasi untuk melawan ulama yang berkuasa saat itu, yaitu Muhammad Beheshti. Muhammad Ali Raja-i naik menjadi presiden yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri. Namun, ia terbunuh dalam peristiwa pemboman pada 30 Agustus 1981 bersama perdana menternya Mohamad Javad Bahonat. Ada yang menduga peristiwa tersebut dilakukan oleh pihak Mujahidi-e Khalq yang tidak puas akan kepemimpinannya. Setelah itu, Majelis Ahli memproses empat kandidat yang maju sebagai calon presiden Iran yang akhirnya terpilih

adalah Ali Khamenei sebagai presiden Iran selanjutnya sekaligus presiden pertama dari kalangan ulama. Dalam hal ini, ketika Ali Khamenei selesai dari masa kepemimpinannya tahun 1989, konstitusi Iran berubah dengan menghilangkan perdana menteri, sehingga Ali Khamenei menjadi supreme leader (Rahbar) atau kepala negara, sedangkan presiden adalah kepala pemerintahan. Keputusan serta fatwa dari Ali Khamenei mempengaruhi perpolitikan di Iran (Mikail 2019).

Setelah Ayatullah Ali Khamenei selesai menjabat sebagai presiden, berikut beberapa daftar presiden Iran dari tahun 1989 hingga saat ini:

No	Nama Presiden	Tahun Menjabat
1	Ali Akbar Hashemi Rafsanjani	1989-1997.
2	Mohammad Khatami	1997-2005.
3	Mahmoud Ahmadinejad	2005-2013.
4	Hassan Rouhani	2013-2021.
5	Ebrahim Raisi, menjabat dari tahun	2021 hingga saat ini

**Tabel 1. Daftar Presiden Iran dari Tahun 1989-Saat ini**

Sumber: (Ridho 2016).

Berbeda halnya dengan pemerintahan Arab Saudi yang berbentuk kerajaan dan system pemerintahannya bersifat monarki absolut yang dipimpin oleh raja dari keluarga Saud. Arab Saudi mengklaim konstitusinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Arab Saudi membagi sistem kekuasaannya atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Akbar 2017). Lembaga eksekutifnya diisi oleh raja dan perdana menteri, lembaga eksekutif disebut majlis al-shura yang diisi oleh para pakar, ulama, dan cendekiawan yang bertugas menasehati raja atas kebijakannya, lembaga yudikatif adalah Dewan Kehakiman Agung yang bertugas memperhatikan hal-hal yang disebut oleh Raja. Namun, semua itu tidak bisa lepas dari pengawasan raja yang memiliki hak mutlak dalam pemerintahan. Berikut beberapa raja yang memimpin Arab Saudi:

No	Nama Presiden	Tahun Menjabat
1	Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud	1932-1953
2	Raja Saud bin Abdul Aziz	1953-1964
3	Raja Faisal bin Abdul Aziz	1964-1975
4	Raja Khalid bin Abdul Aziz	1975-1982
5	Raja Fahd bin Abdul Aziz	1982-2005
6	Raja Abdullah bin Abdul Aziz	2005-2015
7	Raja Salman bin Abdul Aziz	2015-2017
8	Raja Muhammad bin Salman	2017 sampai sekarang

**Tabel 1. Daftar Raja Pemimpin Arab Saudi dari Tahun 1932-Saat ini**

Sumber: (Warsito and Wulandari 2022)

Baik Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman masing-masing memiliki bentuk kebijakannya sendiri. Ali Khamenei selama menjadi Rahbar telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, baik dari segi kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sementara Muhammad bin Salman juga telah mengeluarkan sebuah visi untuk kemajuan Arab Saudi bernama Saudi Vision 2030, yang mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Fatwa dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Khamenei, menurut asumsi penulis tidak terikat oleh periodisasi tahun karena sifatnya yang umum serta menjadi pedoman bagi presiden Iran terpilih selanjutnya. Berikut perbandingan kebijakan antara Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman, yaitu: Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Khamenei sebagai berikut:

1. Memfokuskan dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan mengembangkan dan mewujudkan pembangunan Republik Islam Iran yang berbasis sumber daya manusia dan teknologi.

2. Memperkuat kembali semangat Ukhuwah Islamiyah serta rasa toleransi antar umat beragama yang bertujuan untuk membangun persatuan khususnya pada masyarakat Iran dan umumnya bagi masyarakat Muslim di dunia.
3. Menjalinkan kerja sama dengan negara-negara Muslim lainnya serta ikut berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Non Blok, dan Persatuan Bangsa-Bangsa.
4. Kebijakan yang paling penting bagi Iran adalah pengembangan dan pengayaan uranium dan energi nuklir yang bertujuan sebagai sumber alternatif pengganti dari minyak dan gas bumi (Khamenei 2005).

Kebijakan Muhammad bin Salman (MBS) yang dirumuskan dalam Arab Vision 2030, dapat diringkas sebagai berikut:

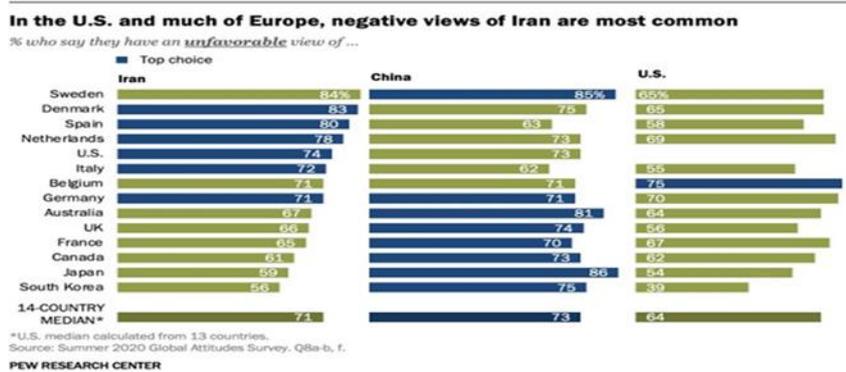
1. Program untuk memperbaiki kualitas ekonomi mengingat bahwa harga minyak dunia telah mengalami penurunan yang signifikan, gaya hidup dengan meningkatkan aktivitas hiburan dari 2,9 ke 6 persen, dan budaya masyarakat Arab Saudi dengan target menjadi kota terbaik di dunia.
2. Pengembangan sektor keuangan yang terdiversifikasi dan efektif untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional, pengembangan sector swasta dengan mengundang pihak asing untuk melakukan investasi ke Arab Saudi, pembentukan pasar modal yang maju, promosi perencanaan keuangan yang semuanya bertujuan menjaga stabilitas pada sector keuangan.
3. Memperkuat program strategis kemitraan, terutama kepada GCC (Gulf Cooperation Council) yang merupakan dewan kerja sama antara kawasan Arab di kawasan teluk, seperti Qatar, Oman, Bahrain, dan Kuwait di berbagai bidang.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan pendidikan dengan membuat beberapa pelatihan untuk para guru, pelatih, staff institusi pendidikan. Kualitas kurikulum juga dikembangkan sehingga bisa bersaing pada tahap internasional (Adriansah 2021).

Dua kebijakan yang telah disebutkan di atas, antara Ali Khamenei dan Muhammad bin Salman, penulis menganalisis bahwa fokus terhadap perkembangan sumber daya manusia lebih ditekankan, tentunya bertujuan pada kemajuan dua negara tersebut. Kemudian pada segi sumber energi, Ayatullah Khamenei telah menyadari untuk tidak bergantung pada minyak dengan memperkuat pengayaan uranium dan energi nuklir. Sementara Muhammad bin Salman dengan kebijakannya agar Arab Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak. Memang hal tersebut sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, namun dalam Saudi Vision 2030, tidak terlihat sumber energi lain yang akan dikembangkan. Secara eksplisit Iran sangat anti kepada Amerika dengan melakukan perang kebudayaan melalui fatwa Ali Khamenei daripada Arab Saudi yang cenderung memiliki hubungan baik dengan Amerika. Sehingga membuat Iran menjadi negara yang tidak memiliki rasa ketergantungan kepada Amerika daripada Arab Saudi yang tidak bisa lepas akan ketergantungannya dengan Amerika.

### Aspek Kritik terhadap Pemerintahan Iran

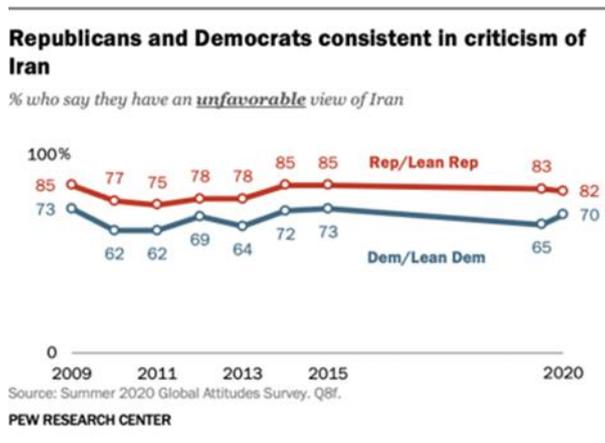
Indeks demokrasi berdasarkan laporan dari beberapa situs seperti Statista.com, Iran menempati posisi ke-14 dari 30 negara yang paling tidak demokratis di dunia. Presentasinya nilainya berjumlah 1.96% yang masih lebih baik daripada Afghanistan (O'Neill 2023). Sementara dari situs democracymatrix.com, Iran menempati posisi 147 dengan nilai 0.25 dengan keterangan moderate autocracy. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun Iran telah melakukan pemilihan umum pada tahun tertentu, namun wewenang dan keputusan tetap berada pada satu orang, yaitu Ayatullah Khamenei. Ini berarti penerapan demokrasi di Indonesia masih lebih baik daripada Iran. Indonesia berada di peringkat 77 dengan nilai 0.587 dengan keterangan deficient democracy. Walaupun demokrasi di Indonesia masih tergolong rendah, namun semua keputusan masih berada di tangan rakyat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pewresearch.org, Iran menjadi negara yang banyak dikritik oleh 14 negara, termasuk di antaranya negara bagian Eropa dan Amerika. Partai sayap kanan di Korea Selatan juga memiliki kecenderungan tidak menyukai Iran dengan presentase sebesar 16%. Berikut statistic beberapa negara yang mengkritik Iran:



**Gambar 1. Pandangan Negatif beberapa Negara terhadap Iran**  
 Sumber: pewresearchcenter.org

Partai Republik di Amerika Serikat lebih condong melihat Iran ke arah negatif dengan hasil presentase sebesar 82%, daripada beberapa anggota Partai Demokrat dan pendukungnya. Adanya pergeseran hubungan antara AS dan Iran pada 2010, bisa mempengaruhi penilaian atau indeks demokrasi terhadap Iran.



**Gambar 2. Pandangan Partai Republik & Partai Demokrat dalam memandang Iran**  
 Sumber: Pewresearchcenter.org

Iran tidak tinggal diam melihat beberapa reaksi dan kecaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa pendukungnya. Dalam laporan di situs resmi yaitu Iranwire.com, Ayatullah Khamenei mengklaim bahwa Iran saat ini telah sesuai dengan kehendak dan pilihan rakyat lewat revolusi yang dilakukan dalam menggulingkan pemerintahan yang buruk, yaitu rezim Shah. Ia juga menambahkan bahwa salah satu pencapaian Revolusi Islam adalah penerapan demokrasi. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan beberapa peraturan, seperti perempuan yang dilarang menjadi bagian dari pemerintahan karena akan melanggar syariat dengan anggapan bahwa perempuan telah mendapatkan hak yang sesuai, pembatasan terhadap agama minoritas, kemudian serikat buruh yaitu Serikat Pekerja Perusahaan Bus yang tidak mendapatkan haknya di Iran dengan dalih tidak memiliki izin resmi. Data mengenai pembatasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda (non-Muslim), Indonesia menempati posisi teratas daripada Iran (“Iran’s Khamenei Slams ‘Enemies’ In New Year Speech” 2023).

Perlu ditegaskan kembali bahwa hak perempuan Iran dalam pemerintahan terlihat pada terpilihnya Masoumeh Ebtekar sebagai Wakil Presiden perempuan pertama di Republik Islam Iran pada era Presiden Khatami tahun 1977. Kesadaran perempuan untuk melakukan praktek politik praktis meningkat pada tahun 1980 dan 1988 dengan presentase sebesar 61.9%. Perkembangan gerakan perempuan Iran semakin massif saat tahun 2009, seorang bernama Neda Agha Soltan dan Haleh Sahabi menuntut agar pemilihan

presiden di Iran untuk lebih terbuka dan jujur. Selain itu, aspek perlindungan terhadap perempuan harus lebih diperhatikan. Kasus lainnya adalah ketika Shirin Ebadi yang kecewa karena perempuan Iran tidak bisa menjadi hakim. Ia terus memperjuangkan agar perempuan Iran bisa menjadi seorang hakim tanpa adanya rasa terkucilkan. Ada juga Fatemeh Javadi yang menjadi wakil presiden Iran pada tahun 2005 (Mikail 2015).

Permasalahan mengenai penggunaan hijab di beberapa negara, termasuk Iran, juga mengalami protes dan reaksi. Dari survei yang dilakukan oleh pewresearch.org, negara yang mewajibkan penggunaan jilbab lebih banyak mendapatkan permusuhan sosial dari negara lain. Sebaliknya, negara yang menganut paham sekuler juga melarang wanita menggunakan hijab di ruang publik. Dalam hal ini kasus Mahsa Amini menjadi perhatian publik atas reaksinya untuk menolak penggunaan hijab sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Iran, seperti pada Pasal 638 Kitab Hukum Pidana Iran yang menjelaskan bagi perempuan yang tidak mengenakan jilbab merupakan suatu kejahatan (Sijabat 2023). Menurut Abbas Manucehri, Iran sangat memperhatikan hak-hak manusia dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan keselamatan jiwa. Secara rinci hak kebebasan yang diberikan adalah kebebasan bekerja, kebebasan berkeyakinan, kebebasan pers dan media, kebebasan mendapatkan pendidikan, kebebasan individu dalam arti manusia tidak boleh diperbudak, kebebasan berpikir, serta kebebasan berserikat atau berkumpul (Manucehri 2019). Beragam aksi protes terus dilakukan untuk menuntut keadilan atas tebusannya Mahsa Amini. Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran bersama Ebrahim Raisi menganggapi hal tersebut dengan tenang dan menerima tuntutan atas kasus tersebut untuk diurut tuntas.

### **Aspek Kritik terhadap Pemerintahan Arab Saudi**

Keresahan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Salman tidak hanya dirasakan oleh Jamal Kashoggi, melainkan juga dirasakan oleh sebagian ulama yang tidak menyetujui akan kebijakan tersebut. Bagi para ulama yang menentang kebijakan tersebut akan diberikan hukuman berupa pemecatan sebagai imam masjid dan dipenjara karena telah menyebarkan paham ekstrimisme tanpa adanya proses pengadilan (Derajat and Kurniawan 2021). Sementara para ulama yang sejalan dengan pemerintah Saudi akan membuat fatwa yang sesuai dengan kebijakan dari raja. Menurut Ibnu Burdah, kondisi keberagaman di Saudi ibarat air yang dibendung atau dikuasai, seharusnya air itu dibiarkan mengalir secara alamiah agar bermanfaat bagi sesama. Bahkan buruknya lagi, agama dijadikan pembendung pemikiran atau pendapat yang berbeda (Burdah 2017).

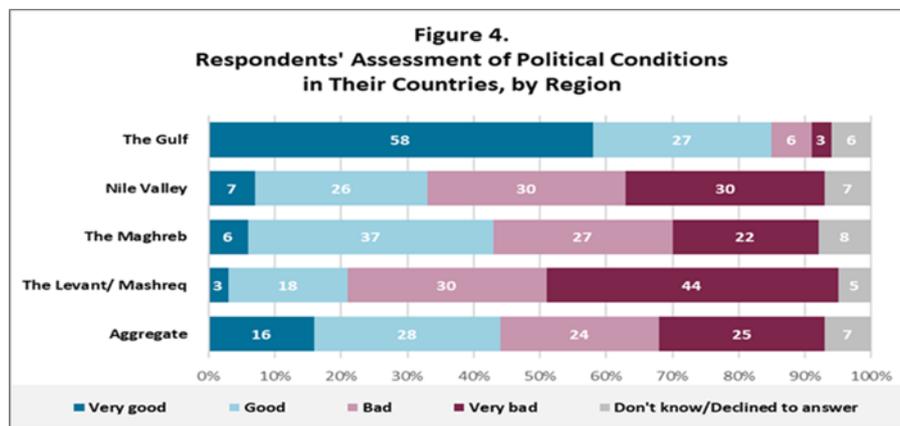
Melansir dari Freedom House, pemerintah Saudi membatasi hampir segala lini hak politik dan kebebasan sipil. Hal ini dibuktikan pada membatasi konten pada pengguna media sosial, seperti twitter, sehingga warga Saudi tidak bisa memberikan komentar akan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Dari segi fasilitas internet yang diberikan, warga Arab Saudi cenderung dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, bahkan untuk kawasan Timur Tengah, Arab Saudi menempati posisi kedua sebagai negara dengan penyediaan internet 5G. Pemerintah Saudi memberikan kemandirian kepada warganya akan kemudahan dengan adanya fasilitas yang memadai untuk digunakan ke pendidikan, pekerjaan, pelatihan, dan lainnya. Akan tetapi, pemerintah Saudi membuat hal tersebut untuk menghindari dari kritikan dalam bentuk apapun sehingga mereka memberi berbagai fasilitas kepada warga negaranya.

Permasalahan lainnya yang mendapatkan perhatian lebih adalah mengenai bagaimana hak bagi kaum minoritas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pewresearch.org pada tahun 2019 hingga 2020, terdapat setidaknya 57 negara yang memberikan pembatasan terhadap agama, termasuk Arab Saudi (Majumdar 2022). Pemerintah Saudi yang menganut mazhab wahabi mempersempit ruang gerak bagi kelompok minoritas, seperti pembatasan terhadap kelompok Syiah. Pemerintah Saudi melalui fatwa ulama seperti ingin menyeragamkan mazhab yang dianut oleh warganya dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan (Wicaksa 2011).

Dalam internal wahabi sendiri juga adanya pertentangan ketika MbS memiliki pandangan yang berbeda terhadap wahabi sosial. Penyebutan wahabi sosial adalah wahabi yang tunduk dan patuh kepada kebijakan pemerintahan Saudi dan fokus menyebarkan paham wahabi ke masyarakat. Wahabi sosial dan MbS yang

sebelumnya sangat ultra-konservatif pada ajaran Islam, terutama dalam memahami status perempuan di ruang publik seperti penggunaan cadar, larangan bergaul dengan pria yang bukan saudara, bahkan larangan menyetir mobil, justru kini bertolak belakang bahkan dalam reformasi Saudi Vision 2030 MbS, yang mana perempuan kini memiliki haknya di ruang publik (Haryadi 2018). Inkonsistensi ini, dari analisis penulis, muncul karena sistem monarki absolut yang mana segala keputusan ada di tangan raja, bahkan para ulama Saudi sendiri terlalu patuh terhadap raja sehingga dengan kata lain pemerintah Saudi sangat jauh dari penerapan nilai-nilai demokrasi.

Majalah Times edisi 16 April 2018 pernah menjelaskan bagaimana penangkapan yang dilakukan pemerintah Saudi kepada para pengusaha, intelektual, aktivis HAM, dan belasan anggota kerajaan juga para menteri yang dibawa ke hotel The Ritz Carlton (Firnanda 2020). Mereka menginterogasi orang-orang yang dianggap mencurigakan bahkan dituduh melakukan korupsi tanpa adanya bukti. Berdasarkan laporan dari Arab Opinion Index 2022, data para responden dari berbagai kalangan yang mengungkapkan tanggapannya mengenai kondisi politik di Arab Saudi pada tahun 2022, hanya 49% saja responden yang menilai negatif, sementara sekitar 44% responden memandang baik, berikut gambarannya:



**Gambar 3. Statistik Para Responden atas Kondisi Politik di Arab Saudi**  
Sumber: Arab Opinion Index 2022

## CONCLUSIONS

Nilai-nilai demokrasi yang sifatnya universal yang sudah banyak dipakai di hampir sebagian negara dunia, tak terkecuali negara yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam hal ini antara Iran dan Arab Saudi, Republik Islam Iran merupakan negara yang cukup terbuka pada demokrasi daripada Arab Saudi. Walaupun banyak kritikan yang datang terhadap Iran, seperti kasus kematian Mahsa Amini dan hak-hak perempuan yang masih dipertanyakan, telah dibuktikan dengan ketenangan dan keterbukaan oleh Ayatullah Khamenei dalam menanggapi kasus tersebut untuk diusut tuntas. Sementara Arab Saudi di bawah kepemimpinan MbS lebih tertutup terhadap kritikan. Antara dua negara tersebut umat Islam bisa merefleksikan kembali sistem pemerintahan yang ideal, dengan melihat bagaimana agama dan negara berjalan beriringan tanpa melupakan nilai-nilai demokrasi.

## REFERENCES

- Adriansah, Andi. 2021. "Peran Politik Muhammad Bin Salman Dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi." UIN Syarif Hidayatullah.
- Akbar, Idil. 2017. "Khilafah Islamiyah: Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)." *Journal of Government and Civil Society* 1 (1): 95–109.
- Al-Hadar, Husein Ja'far. 2014. "Falsafat Politik Wilayah Al-Faqih." *Ilmu Ushuluddin* 2 (2): 89–108.
- Aminah, S, and Rokan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2008. *Islam and The Secular State*. London: Harvard University Press.
- Ashadi, Willi. 2019. "Human Security Dan Islam: Studi Kasus Kematian Jamal Ahmad Khasoggi." *Dauliyah: Journal of Islamic and Internasional Affairs* 4 (2): 50–65.
- Burdah, Ibnu. 2017. "Jebolnya Bendungan Wahabisme." *Geotimes*. 2017.
- Derajat, Anna Zakiah, and Toni Kurniawan. 2021. "Saudi Vision 2030 Dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi." *Global & Policy* 9 (1): 39–50.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. 2018. "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12 (1): 51–70. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1328>.
- Firnanda, Rahmat. 2020. "Perspektif Kritis Jamal Khashoggi Dalam Artikel Washington Post Terhadap Kebijakan Arab Saudi." *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humanior* 8 (2): 61–89.
- Haryadi, Panji. 2018. "Peran Muhammad Bin Salman Terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi." *Jurnal ICMES* 2 (1): 25–47.
- Hidayat, Wahyu. 2023. "Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei)." *Matbla'ul Fatah (Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam)* 14 (1): 63–84.
- "Iran's Khamenei Slams 'Enemies' In New Year Speech." 2023. *Iranwire.Com*. 2023.
- Khamenei, Imam Ali. 2005. *Perang Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Cahaya.
- Majumdar, Samirah. 2022. "How COVID-19 Restrictions Affected Religious Groups Around The World in 2020."
- Manucehri, Abbas. 2019. *Sistem Politik Republik Islam Iran (Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi)*. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.
- Mas'odi, Mas'odi, and Fandi Ahmad. 2023. "Mahsa Amini, Hijab, and Mass Movements: Reading the Iranian Constitution About Women in Public Spaces." *Syura: Journal of Law* 1 (1): 25–41. <https://doi.org/10.58223/syura.v1i1.38>.
- Mikail, Kiki. 2015. "Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979." *ADDIN* 9 (2): 253–76.
- . 2019. "Sistem Politik Iran Kontemporer: Dari Westernisasi Hingga Islamisasi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 8 (2): 140–48.
- Muzakkir, Muhammad Rofiq. 2023. *Dekolonisasi: Metodologi Kritis Dalam Studi Humaniora Dan Studi Islam*. Sleman: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara.
- O'Neill, Aaron. 2023. "Iran-Statistics & Facts." <https://www.Statista.Com/>. 2023.
- Ridho, M. Zainor. 2016. "Iran: Negara Dan Masuknya Hirarkhi Agama." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 7 (1): 38–49.
- Sijabat, Iccha Anjelita. 2023. "Upaya Woman Life Freedom Dalam Menegakkan Kebebsana Perempuan Di Iran (Studi Kasus Kematian Mahsa Amini)." Universitas Sriwijaya.
- Smith, Patrick. 2022. "Iran's Supreme Leader Breaks Silence on Mahsa Amini, Blaming U.S. and Israel for Violent Protests." *NBC News*. 2022.
- Tamara, Nasir. 2017. *Revolusi Iran*. Cet I. Jakarta: Sinar Harapan.
- Umam, Khotibul. 2022. "Rivalitaas Arab Saudi, Iran, Dan Israel Di Kawasan Timur Tengah." *Populika* 10 (2): 1–10.
- Warsito, Adi, and Serli Wulandari. 2022. "Konsep Pemerintahan Arab Saudi Dan Kebijakan Visi 2030." *Tanjak: Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam* 2 (3): 232–41.
- Wicaksa, Arif. 2011. "Strategi Arab Saudi Terhadap Stabilitas Pemerinitahannya Tahun 2011-2013." *JOM FISIP* 2 (1): 1–15.